

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah salah satu tingkat atau jenjang pendidikan yang dilalui setelah tingkat Sekolah Dasar (SD). Sekolah Menengah Pertama ditempuh dalam jangka waktu 3 tahun, dimulai dari kelas 7 hingga kelas 9. Sekolah Menengah Pertama diselenggarakan oleh pemerintah ataupun pihak swasta. Pada awalnya Sekolah Menengah Pertama dikelola oleh Dinas Pendidikan Nasional, namun setelah dikeluarkannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan Sekolah Menengah Pertama menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Dan Dinas Pendidikan Nasional berperan sebagai pemberi regulasi dalam bidang standar nasional pendidikan.

Kecamatan Margahayu adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Bandung Selatan, Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Margahayu ini memiliki luas wilayah sebesar 933.30 Hektar, dan memiliki 5 desa/kelurahan. Kecamatan Margahayu memiliki 10 sekolah tingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ataupun setingkatnya yang dikelola oleh pemerintah juga swasta dibawah naungan Dinas Pendidikan dan tercantum dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut data Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Margahayu.

Tabel 1.1 Daftar Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Margahayu

No.	Nama Sekolah	Keterangan
1.	SMP Angkasa Lanud Sulaiman	Swasta
2.	SMP IT Anni'mah	Swasta
3.	SMP KP Margahayu	Swasta
4.	SMP Marhas	Swasta
5.	SMP Mathlaul Anwar Margahayu	Swasta
6.	SMP Muhammadiyah 4 Margahayu	Swasta
7.	SMPK 3 Bina Bakti	Swasta
8.	SMPN 1 Margahayu	Negeri
9.	SMPN 2 Margahayu	Negeri

10.	SMPN 3 Margahayu	Negeri
-----	------------------	--------

*Sumber: <http://referensi.data.kemdikbud.go.id/>*

Menurut data dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Wilayah I menyebutkan bahwa 10 sekolah tersebut, memiliki jumlah guru atau tenaga pendidik sebanyak 340 orang. Dengan rincian yaitu, 165 orang dari SMP negeri dan 175 orang dari SMP swasta di Kecamatan Margahayu.

## 1.2. Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi ini, masyarakat di dorong untuk mengikuti perubahan, terlebih lagi perubahan dalam bidang teknologi. Perubahan dalam bidang teknologi terjadi secara pesat dan mempengaruhi berbagai aspek di dunia. Termasuk bidang pemerintahan di Indonesia. Dengan pemanfaatan teknologi, sistem pemerintahan diharapkan mampu untuk berubah menjadi pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga dapat mencapai *good governance*.

Merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, Presiden telah menginstruksikan kepada setiap sektor pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Tujuan dari *e-government* ini adalah untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien, efektif dan transparan. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk pembangunan pendidikan di Indonesia disebutkan dalam Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pendidikan. Baik itu mengaplikasikan teknologi dan informasi dalam sistem pembelajaran, pengelolaan manajemen pendidikan, pengelolaan di bidang kepegawaian maupun dalam berbagai kegiatan pendidikan lainnya.

Namun ternyata hingga saat ini pengembangan penerapan *e-government* di Indonesia belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Basuki Yusuf Iskandar yang dikutip dari laman Kominfo yaitu “Berdasarkan hasil survei PBB pada tahun 2016 mengenai *e-Government Development Indeks* (EGDI), ternyata posisi Indonesia dan Timor Leste masih belum memuaskan.

Hal ini ditandai dengan posisi ranking EGDI kedua negara tergolong pada posisi bawah, Indonesia pada peringkat ke-116 dan Timor Leste pada peringkat 160. Dimana pada tahun ini Indonesia turun sepuluh peringkat dari tahun 2014. Ini artinya kualitas pengembangan *e-government* di Indonesia dan Timor Leste masih perlu ditingkatkan”.

Dengan diterapkannya kebijakan *e-government* di Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kecamatan Margahayu, terdapat pergeseran budaya kerja yang menjadi lebih modern yaitu dengan penggunaan teknologi pada saat proses kerja. Namun seperti yang dikatakan oleh Basuki Yusuf Iskandar (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika), bahwa saat ini pengembangan penerapan *e-government* diberbagai sektor, termasuk di sektor pendidikan belum berjalan dengan baik. Seperti halnya yang terjadi pada Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kecamatan Margahayu. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan masih kurang maksimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) diberbagai sektor pemerintah. Diantaranya adalah masih terbatasnya regulasi sebagai payung hukum yang menjelaskan tentang mekanisme penerapan *e-government*, terbatasnya tenaga ahli yang kompeten di bidang teknik informatika, belum terintegrasinya data antar sektor pemerintahan, anggaran yang kurang memadai, tidak adanya standarisasi infrastruktur, serta minimnya tingkat keamanan informasi dalam penerapan *e-government*. Seringkali ketika terdapat kelemahan dalam penerapan *e-government*, lebih banyak menyoroti dari sisi rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor tersebut.

Disebutkan oleh Rivai & Basri (2011:14) mengenai kinerja yaitu *Performance* berasal dari kata “*to perform*” yang mempunyai beberapa masukan (*entries*), yaitu: (1) melakukan, (2) memenuhi atau menjalankan sesuatu, (3) melaksanakan suatu tanggung jawab, dan (4) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang. Dari masukan tersebut dapat disimpulkan arti kinerja adalah pelaksanaan suatu pekerjaan dan penyempurnaan pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Kinerja merupakan proses, dimana dalam proses tersebut dilaksanakan penyempurnaan-penyempurnaan sehingga mencapai hasil pekerjaan yang optimal. Dan dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengukuran hasil akhir, yang

dilakukan untuk melaksanakan kegiatan beserta tanggung jawab yang diberikan pada sebuah organisasi.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru menyebutkan bahwa, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, dan menengah. Untuk menjalankan tugasnya tersebut, guru dituntut harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk mengetahui kondisi penguasaan kompetensi dari guru, maka pemerintah melakukan pemetaan kompetensi guru melalui uji kompetensi guru. Dalam uji kompetensi guru ini lebih terfokus pada pemetaan penguasaan guru terhadap kompetensi pedagogik dan profesional. Hasil dari uji tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian program pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Untuk mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, maka pelaksanaan UKG ini dilaksanakan secara *Online* dan secara manual. Bekerja sama dengan beberapa lembaga/ badan yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Salah satu tujuan dari diadakannya Uji Kompetensi Guru ini adalah sebagai *entry point* penilaian kinerja guru dan sebagai alat kontrol pelaksanaan penilaian kinerja guru. Merujuk kepada salah satu tujuan dari dilaksanakannya *e-government* yaitu untuk meningkatkan kinerja guru sesuai dengan salah satu tujuan dari *e-government* itu sendiri, yaitu *Government to Employee*: Pada akhirnya, aplikasi *e-government* juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat”, menurut Indrajit (2016:41). Juga sesuai dengan salah satu

komponen kompetensi yang didefinisikan oleh Spencer dalam buku Moeheriono (2012:3) yaitu Hubungan kausal (*causally related*) berarti kompetensi dapat menyebabkan atau digunakan untuk memprediksikan kinerja seseorang, artinya jika mempunyai kompetensi yang tinggi, maka akan mempunyai kinerja tinggi pula (sebagai akibat).

Awalnya kebijakan atau program Uji Kompetensi Guru ini sudah dilaksanakan pada tahun 2012 namun tujuannya adalah untuk guru-guru yang akan melaksanakan program sertifikasi guru. Sedangkan Uji Kompetensi Guru yang dimaksudkan untuk pemetaan guru, pertama kali berlangsung pada tahun 2014. Setiap tahunnya dalam Uji Kompetensi Guru ini, diberikan standar kelulusan yang harus dicapai oleh para guru untuk menyatakan bahwa dirinya lulus atau memiliki standar kompetensi yang ditentukan oleh pemerintah. Menurut Yudhistira dalam website [bhataramedia.com](http://bhataramedia.com) menyebutkan bahwa standar kelulusan Uji Kompetensi Guru dari tahun ke tahun meningkat. Seperti pada tahun 2014, Uji Kompetensi Guru hanya memiliki standar kelulusan sebesar 4.7. Dan di tahun 2015 menjadi 5.5, pada tahun 2016 menjadi 6.0, tahun 2017 menjadi 7.0, sedangkan untuk tahun 2018 standar kelulusannya akan menjadi sebesar 7.5 dan pada tahun 2019 sebesar 8.0. Hal tersebut diberlakukan untuk melaksanakan sasaran program strategi pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 antara lain adalah meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari *Subject and Pedagogic Knowledge* yang diharapkan akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa. Oleh karena itu untuk mengukur capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maka pada tahun 2015 Uji Kompetensi Guru serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Penerapan Kebijakan *E-government* melalui Uji Kompetensi Guru *Online* di SMP Kecamatan Margahayu dilaksanakan dari tahun ke tahun di mulai dari tahun 2014. Namun dalam praktis penyelenggaraanya tidak setiap tahun dilaksanakan oleh orang-orang yang sama, tetapi dibagi ke dalam penjadwalan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk melihat bagaimana penerapan kebijakan *e-government* ini diterima oleh pegawai khususnya guru-guru di SMP Kecamatan Margahayu, penelitian ini

menggunakan model UTAUT yang pada dasarnya melihat bagaimana masyarakat atau konsumen menerima suatu teknologi. Karena pada dasarnya penerapan kebijakan *e-government* itu sendiri didasarkan kepada teknologi, komunikasi dan informatika.

Penerapan kebijakan *e-government* ini sudah hampir diterapkan diseluruh bidang kementerian di Indonesia, adapun urutan tingkat penerapan kebijakan *e-government* di kementerian di olah dalam Pemingkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) oleh Direktorat *e-Government*, Ditjen APTIKA-KEMKOMINFO RI adalah sebagai berikut:

PeGI Tingkat Kementerian Tahun 2015

NO	KEMENTERIAN	DIMENSI				NILAI RATA-RATA	KATEGORI	
		KEBUAKAAN	KELEMBAGAAN	INFRASTRUKTUR	APLIKASI			PERENCANAAN
1	Kementerian Keuangan	3.60	3.73	3.67	3.60	3.73	3.67	SANGAT BAIK
2	Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah	3.20	3.53	3.53	3.50	3.27	3.41	BAIK
3	Kementerian Luar Negeri	3.30	3.40	3.23	3.27	3.40	3.32	BAIK
4	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	3.27	3.20	3.33	3.20	3.20	3.24	BAIK
5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.07	3.10	3.43	3.03	3.17	3.16	BAIK
6	Kementerian Komunikasi dan Informatika	3.15	3.24	3.20	3.28	2.88	3.15	BAIK
7	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3.20	3.07	2.97	3.23	3.07	3.11	BAIK
8	Kementerian Kesehatan	3.03	3.00	3.17	3.03	2.83	3.01	BAIK
9	Kementerian Perhubungan	3.07	3.00	3.13	2.73	2.87	2.96	BAIK
10	Kementerian Perdagangan	2.80	2.67	3.07	3.13	2.80	2.89	BAIK
11	Kementerian Pertanian	2.67	2.80	2.87	2.93	3.00	2.85	BAIK
12	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2.80	2.80	2.87	2.80	2.87	2.83	BAIK
13	Kementerian Pertahanan	2.60	2.67	2.73	2.53	2.87	2.68	BAIK
14	Kementerian Hukum dan HAM	2.78	2.42	2.53	3.03	2.57	2.67	BAIK
15	Kementerian Sekretariat Negara	2.63	2.63	2.55	2.85	2.40	2.61	BAIK
16	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	2.20	2.33	3.33	2.53	2.33	2.55	BAIK
17	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2.42	2.18	2.30	2.57	2.95	2.48	KURANG
18	Kementerian Agama	2.47	2.20	2.80	2.93	1.80	2.44	KURANG
19	Kementerian Ketenagakerjaan	2.27	2.20	2.33	2.53	2.40	2.35	KURANG
20	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.43	1.98	2.34	2.40	2.07	2.24	KURANG
21	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2.07	2.07	2.20	2.07	2.00	2.08	KURANG
22	Kementerian Pemuda dan Olahraga	2.30	1.70	2.13	2.27	1.83	2.05	KURANG
23	Kementerian Pariwisata	2.27	1.93	2.20	2.07	1.73	2.04	KURANG
24	Kementerian Sosial	1.73	2.00	2.60	1.87	1.93	2.03	KURANG
25	Kementerian Dalam Negeri	1.77	2.13	2.27	2.40	1.53	2.02	KURANG
26	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.73	1.73	2.43	2.37	1.53	1.96	KURANG
27	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	1.53	1.73	2.07	1.87	1.53	1.75	KURANG
RATA-RATA		2.6	2.6	2.8	2.7	2.5	2.7	BAIK

Sumber: [pegi.layanan.go.id](http://pegi.layanan.go.id)

Gambar 1.1 Peringkat *E-Government* Indonesia Tahun 2015

Pada gambar 1.1 dapat di lihat bahwa dua puluh tujuh bidang kementerian Indonesia sudah melaksanakan *e-Government* dengan rata-rata kategori adalah baik. Pada tahun 2015, untuk Kementrian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah berada pada peringkat ke dua dari dua puluh tujuh bidang kementerian. Dalam gambar tersebut dapat dilihat bahwa Kementrian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3.41 dengan kategori baik, dan memiliki nilai dimensi, infrastruktur dan aplikasi yang masuk ke dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan data di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi di Bidang Pendidikan, lebih tepatnya pada SMP di wilayah Kecamatan Margahayu dengan Judul Pengaruh Penerapan Kebijakan *E-government* melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) *Online* terhadap Kinerja Guru di SMP Kecamatan Margahayu dengan Menggunakan Model UTAUT.

### 1.3. Perumusan Masalah

*E-government* memiliki tujuan untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien, efektif dan transparan. Pada tahun 2003, *e-government* mulai diterapkan dengan merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* serta diperkuat dengan Keputusan Menteri No.55 Tahun 2003 tentang panduan pembangunan infrastruktur portal pemerintah. Namun, hingga tahun 2016, Indonesia masih menduduki peringkat ke-116 dalam proses pengembangan penerapan *e-government* di dunia. Dari hasil survei tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum menerapkan *e-Government* dengan maksimal. Maka dari itu di dapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan *e-government* di sektor pemerintahan di Indonesia. Salah satu faktornya adalah terbatasnya tenaga ahli yang kompeten di bidang teknik informatika.

Untuk menunjang keberlangsungan kebijakan *e-government*, pemerintah memberikan beberapa putusan untuk menjalankan kebijakan ini diberbagai bidang, salah satunya di bidang pendidikan. Penerapan kebijakan *e-government* di bidang pendidikan, salah satu contohnya adalah dilaksanakannya Uji Kompetensi Guru (UKG). Awalnya kebijakan atau program Uji Kompetensi Guru ini sudah dilaksanakan pada tahun 2012 namun tujuannya adalah untuk guru-guru yang akan melaksanakan program sertifikasi guru. Sedangkan Uji Kompetensi Guru yang dimaksudkan untuk pemetaan guru, pertama kali berlangsung pada tahun 2014. Yang salah satu caranya dilaksanakan dengan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi atau biasa dikenal dengan CBT (*Computer Based Test*). Karena pelaksanaan Uji Kompetensi Guru ini menggunakan komputer dan berbasis teknologi.

Salah satu tujuan dilaksanakannya Uji Kompetensi Guru ini adalah sebagai *entry point* penilaian kinerja guru dan sebagai alat kontrol pelaksanaan penilaian kinerja guru. Dengan merujuk kepada salah satu tujuan dari dilaksanakannya *e-government* yaitu untuk meningkatkan kinerja guru sesuai dengan salah satu tujuan dari *e-government* itu sendiri, yaitu *Government to Employee*: Pada akhirnya, aplikasi *e-government* juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat”, menurut Indrajit, (2016:41). Juga sesuai dengan salah satu komponen kompetensi yang didefinisikan oleh Spencer dalam buku Moeheriono (2012:3) yaitu Hubungan kausal (*causally related*) berarti kompetensi dapat menyebabkan atau digunakan untuk memprediksikan kinerja seseorang, artinya jika mempunyai kompetensi yang tinggi, maka akan mempunyai kinerja tinggi pula (sebagai akibat)

Setiap tahunnya dalam Uji Kompetensi Guru ini, diberikan standar kelulusan yang harus dicapai oleh para guru untuk menyatakan bahwa dirinya lulus atau memiliki standar kompetensi yang ditentukan oleh pemerintah. Menurut Yudhistira dalam website bhataramedia.com dalam websitenya menyebutkan bahwa standar kelulusan UKG dari tahun ke tahun meningkat. Hal tersebut diberlakukan untuk melaksanakan sasaran program strategi pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 antara lain adalah meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari *Subject and Pedagogic Knowledge* yang diharapkan akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa. Oleh karena itu untuk mengukur capaian RPJMN, maka pada tahun 2015 Uji Kompetensi Guru serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia.

#### 1.4. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut

1. Bagaimana penerapan kebijakan *e-government* di bidang pendidikan melalui Uji Kompetensi Guru *Online* di SMP Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung?



2. Bagaimana hasil Uji Kompetensi Guru di SMP Kecamatan Margahayu?
3. Bagaimana kinerja guru di SMP Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana hubungan antara proses penerapan kebijakan *e-government* melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) *Online* terhadap kinerja guru di SMP Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.
5. Bagaimana hubungan antara Uji Kompetensi Guru dengan kinerja guru di SMP Kecamatan Margahayu?

#### 1.5. Tujuan Penelitian

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki tujuan yang jelas, agar apa yang menjadi sasaran dapat terwujud dan memiliki nilai guna. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan *e-government* di bidang pendidikan melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) *Online* di SMP Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana hasil Uji Kompetensi Guru *Online* di SMP Kecamatan Margahayu.
3. Untuk mengetahui bagaimana kinerja guru di SMP Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui hubungan antara proses penerapan *e-government* melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) *Online* terhadap kinerja guru di SMP Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.
5. Bagaimana hubungan antara Uji Kompetensi Guru dengan kinerja guru di SMP Kecamatan Margahayu?

#### 1.6. Manfaat Penelitian

Dari judul penelitian Pengaruh Penerapan Kebijakan *e-government* melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) *Online* terhadap Kinerja Guru di SMP Kecamatan Margahayu dengan Menggunakan Model UTAUT, peneliti berharap dapat memberikan manfaat dari penelitian yang telah dilakukan. Terdapat dua manfaat yang mungkin di dapat dari hasil penelitian ini, yaitu berdasarkan:

### 1.6.1. Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis berhubungan dengan ilmu pengetahuan, oleh karena itu manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah dapat mengaplikasikan dan mengembangkan teori-teori yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dengan membuat laporan penelitian secara ilmiah dan sistematis, juga memperkaya ilmu pengetahuan baru.

### 1.6.2. Aspek Praktis

Aspek Praktis berhubungan dengan praktik didalam penerapan suatu teori. Oleh karena itu manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pemerintah dalam pengaplikasian kebijakan *e-government* di bidang pendidikan. Dimaksudkan untuk memberikan masukan positif terhadap pemerintah melalui Dinas Pendidikan juga tenaga pendidik di SMP wilayah Kecamatan Margahayu untuk meningkatkan kinerja. Serta berupaya untuk membuat sebuah karya yang kelak dapat dibaca, dinikmati dan dipahami untuk meningkatkan kualitas pelayanan di berbagai bidang pemerintahan khususnya pada bidang pendidikan.

## 1.7. Ruang Lingkup Penelitian

### 1.7.1. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel dengan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen terdiri dari ( $X_1$ ) yaitu Penerapan kebijakan *e-government* melalui Uji Kompetensi Guru *Online* dengan menggunakan model UTAUT dengan empat indikator, *performance expectancy*, *effort expectancy*, *social influence* dan *facilitating conditions* dan ( $X_2$ ) yaitu Uji Kompetensi Guru *Online* yang menguji kompetensi pedagogik dan profesional juga variabel dependen (Y) yaitu Kinerja Guru dengan penilaian melalui indikator atau kompetensi Pedagogik, Kepribadian, Sosial, dan Profesional.

### 1.7.2. Lokasi dan Objek Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di wilayah Kecamatan Margahayu dengan objek penelitian yaitu guru SMP di wilayah Kecamatan Margahayu, dengan jumlah guru sebanyak 340 orang. Penelitian ini menggunakan sampel dari populasi, untuk

teknik pengambilan sampel digunakan *Convenience Sampling* sehingga didapat responden sebanyak 77 orang.

### 1.7.3. Waktu dan Periode Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan September 2017 hingga bulan Januari 2018. Periode penelitian ini dengan mengambil dan mengolah data dari tahun 2015-2017.

### 1.8. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar, sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan gambaran umum dari objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah yang didasarkan latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, dan ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan dari tugas akhir.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka penelitian tentang teori yang dijadikan sebagai acuan dari variabel yang akan diteliti. Selain itu bab ini pun menguraikan mengenai penelitian terdahulu sebagai pendukung dan acuan penelitian, kerangka pemikiran yang membahas mengenai pola pikir yang menggambarkan mengenai permasalahan yang akan dibahas, dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang dilaksanakan, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi dan definisi variabel operasional, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel yang akan diteliti, serta teknis untuk menganalisis data.

#### **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil dari pengelolaan data yang diperoleh. Sehingga hasil tersebut akan dianalisis oleh penulis agar menemukan kesimpulan dari penelitian ini.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari penafsiran terhadap analisa temuan penelitian dan saran secara jelas. Adapun saran yang dijabarkan diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi instansi yang diteliti oleh penulis.